



Dari Pikulan ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900 – 1942

Yudi Prasetyo

Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sidoarjo

Prastyudi19@gmail.com

Abstract

This article discusses the history and dynamics of grocery stores and Chinese people in Yogyakarta in 1900 - 1942. This study began in the early twentieth century to the period of the Japanese occupation of Indonesia. This study aims to understand how the historical roots of the formation of grocery and the involvement of ethnic Chinese in running and developing these trade businesses. Analytical critical historical approach is a method that is applied in reconstructing historical reality in the past and understanding continuity in the present era. The results showed that the existence of a grocery store has undergone a process of transformation from nomadic to permanent marketing. In addition, the joint venture system among Chinese and customers also has a large role in the development of a grocery business in Yogyakarta.

Keywords: History, Grocery, Chinese, Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini membahas sejarah dan dinamika toko kelontong dan orang Tionghoa di Yogyakarta tahun 1900 – 1942. Kajian ini dimulai sejak awal abad XX hingga periode era pendudukan Jepang ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akar historis terbentuknya kelontong serta keterlibatan etnis Tionghoa dalam menjalankan dan mengembangkan usaha perdagangan tersut. Pendekatan sejarah kritis analitis merupakan metode yang diaplikasikan dalam merekonstruksi realitas historis di masa lalu serta memahami kontinuitas di era sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan toko kelontong telah mengalami proses transformasi dari yang bersifat nomaden menjadi pemasaran secara menetap. Selain itu, sistem kongsi di kalangan Tionghoa dan pelanggan juga memiliki peran besar dalam perkembangan usaha kelontong di Yogyakarta.

Kata Kunci: Sejarah, Kelontong, Tionghoa, Yogyakarta

Received : 27 April 2020; Revised: 16 Mei 2020; Accepted: 29 Mei 2020



Pendahuluan

Kemajuan zaman telah berdampak pada perubahan pola masyarakat dalam berbelanja yang pada awalnya berada pada tataran pasar tradisional (traditional market), minimarket, supermarket hingga hypermarket yang merupakan sistem pemasaran secara ritel.

Minimarket dengan sistem waralaba adalah sistem penjualan yang paling mudah dapat kita jumpai di berbagai kota dan menjadi kompetitor utama dari toko-toko kelontong tradisional. Pada dasarnya kedua konsep usaha tersebut memiliki persamaan dalam aspek upaya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak jarang kehadiran minimarket berdampak pada perpindahan konsumen dari toko kelontong ke minimarket hingga mengakibatkan tutupnya toko kelontong sebagai dampak dari ketidakmampuan berkompetisi terhadap permintaan pasar (Muhzinat, 2019: 204-205).

Fenomena menjamurnya berbagai minimarket tidak terlepas dari transformasi toko kelontong di masa lampau. Bahkan apabila ditelusuri lebih mendalam konsep toko kelontong yang bersifat menetap berawal dari sistem penjualan secara nomaden dan dijajakan secara individual ke berbagai wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menfokuskan bagaimana perubahan dan kontinuitas masyarakat Tionghoa dan kelontong di Yogyakarta sejak tahun 1907 – 1942.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis analitis. Prosedur implementasinya diawali dengan: *pertama*, heuristik berupa pengumpulan berbagai sumber terkait yang bersifat sumber primer, sekunder, tersier. *Kedua*, kritik atau verifikasi sumber, proses pengujian kredibilitas sumber yang terkumpul. *Ketiga*, interpretasi, proses analisis dan penafsiran data. *Keempat*, historiografi yang merupakan tahap akhir sekaligus proses penulisan sejarah (Tamburaka, 1999: 5).

Yogyakarta sebagai salah satu kota provinsi dan kerajaan terbesar di Hindia Belanda menjadi batasan spasial dalam pembahasan artikel ini dikarenakan orang Tionghoa telah menetap dan memiliki relasi yang baik dengan kerajaan Yogyakarta. Hal ini tidak hanya pada aspek urusan perniagaan namun juga aspek privat. Tercatat selir Sultan Hamengkubuwana II bernama Ayu Sumarsonowati memiliki darah keturunan dari etnis Tionghoa (Carey, 1985: 42).

Kajian tentang sejarah dan dinamika toko kelontong dan kaitannya dengan etnis Tionghoa di Hindia Belanda dirasa tidak begitu banyak. Hal ini kemungkinan terminologi kelontong jarang disebutkan karena akurasi padanan kata dengan bahasa Inggris atau Belanda yang jarang menempatkan kata kelontong sebagai referensi kata kunci dalam sumber-sumber berbahasa asing. Sehingga kerap terjadi pemahaman yang kurang akurat dengan penggunaan terminologi street vendors (Pedagang Kaki Lima) / pedlars (pedagang keliling) untuk merujuk pedagang kelontong.

Meski demikian, sebuah literatur dari sejarawan UGM, Suhartono W. Pranoto secara eksplisit menegaskan terminologi “klonthong” dalam artikelnya “Tionghoa Klonthong: *Rural Peddlers in the Residency of Surakarta 1850-1920*”, dalam buku Schutte, G.J. (ed.). 1994. *State and Trade in the Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press. Artikel ini membahas bagaimana peran pedagang keliling Tionghoa di kawasan Surakarta dan Yogyakarta.

Selain itu, terdapat pula tulisan J.L. Vleming Jnr., “*The Chinese Business Community Today in the various parts of Netherlands India*” dalam bunga rampai Fernando, M.R. and David Bulbeck (eds). *Chinese Economic Activity in Netherlands India: Selected Translations from the Dutch*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies terbitan tahun 1992 membahas bagaimana kategorisasi komunitas bisnis etnis Tionghoa dan salah satunya terdapat tentang kelontong. Ia memaparkan bagaimana mekanisme dan karakteristik pedagang kelontong menjajakan dagangannya di berbagai kawasan hinterland Jawa.

Twang Peck Yang dengan karyanya *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* ini sangat relevan karena karya yang berasal dari disertasi ini mampu mendeskripsikan bagaimana dinamika ekonomi masyarakat etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Jepang yang dirasakan telah merusak seluruh jaringan perdagangannya dalam skala besar, termasuk pada aspek pedagang kelontong.

Kajian tentang kelontong juga sempat disinggung oleh Robert R. Rush, Liem Twan Djie, dan Ong Eng Die meski tidak secara spesifik dan akan dijabarkan lebih mendalam pada tataran pembahasan.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memaparkan dan menelusuri jejak historis atas perubahan dan kontinuitas dari toko kelontong etnis Tionghoa di Yogyakarta dengan pendekatan sejarah. Dengan demikian, terjadi pemahaman yang komprehensif bagaimana transformasi pedagang toko kelontong di awal abad XX hingga eksistensinya di masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Lahirnya Komunitas Tionghoa Yogyakarta

Eksistensi komunitas Tionghoa dari daratan Tiongkok daratan (mainland China) ke Nusnatara diperkirakan sejak abad XV (tahun 1400-an), terutama pasca era keruntuhan kerajaan Majapahit dimana penguasa lokal Jawa mulai terbiasa dengan barang impor mewah dari Tiongkok, yakni: sutra, porselin dan barang-barang dari bahan pernis (Carey, 1984: 4).

Sedangkan kepastian sejak kapan eksistensi etnis Tionghoa hadir di Yogyakarta masih meragukan karena pada dasarnya mereka juga berinteraksi dengan masyarakat namun belum membentuk sebuah komunitas etnis Tionghoa. Meski demikian, mereka telah membanung relasi yang baik dengan penguasa lokal sejak era Hamengku Buwana I (1749 - 1792) dan Hamengku Buwana II (1792 - 1810) ketika etnis Tionghoa dipercaya sebagai dukun pengobatan dan guru bela diri (*vechterbazen*), dengan senjata tongkat, bagi tentara keraton Yogyakarta (Carey, 1985: 33).



Sketsa gambaran orang Tionghoa di Jawa pada awal abad XIX dengan khas pakaian dan rambut Tauchang

Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden.

Pada masa era kekuasaan Inggris terhadap Yogyakarta di tahun 1812 mulai terbentuk secara tegas pembentukan komunitas Tionghoa. Mereka ditempatkan pada konsentrasi area tertentu yang kelak menjadi sebuah kampung Cina (Pecinan/China Town).

Pada awalnya para imigran dari Tiongkok ini didominasi oleh kalangan pria yang merantau ke Nusantara dengan jalur pelayaran dengan memanfaatkan musim angin muson barat dan timur dalam rentang waktu setiap enam bulan.

Kondisi ini memaksa mereka untuk menetap dan berasimilasi dengan masyarakat Jawa hingga pada akhirnya mereka menikahi wanita-wanita pribumi setempat. Keturunan dari pernikahan tersebut yang kelak menghasilkan kategorisasi kelompok etnis Tionghoa totok dan perakan.

Mereka yang dianggap Tionghoa totok adalah golongan orang yang dikategorikan berdasarkan aspek: kedatangannya (generasi pertama yang baru pertama kali tinggal di Hindia Belanda), bahasa yang digunakannya, agama atau kepercayaan yang dianut, cara pandang konservatif, dan tradisi leluhur yang dijaga nenek moyang mereka di negeri Cina daratan (Mainland China).

Sedangkan etnis Tionghoa peranakan adalah antitesis dari Tionghoa totok yang dapat dikategorisasi berdasarkan: keturunan generasi berikutnya dan telah mengalami asimilasi dengan masyarakat sekitar, baik dari kalangan Barat maupun pribumi, pada aspek aplikasi bahasa sehari-hari, cara pandang modern, tradisi serta gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman).

Memasuki abad XIX, terutama 1883-1892, tercatat 29.523 orang imigran Tionghoa memasuki wilayah Jawa). Hal ini terkait dengan adanya migrasi besar dari negeri Tiongkok akibat dari dibukanya Terusan Suez yang mempersingkat durasi perjalanan masyarakat global dari berbagai penjuru dunia ke kawasan Asia Tenggara dan Hindia Belanda. (Claver, 2010: 210).

Koentjaraningrat menilai bahwa kedatangan orang Tionghoa tersebut disebabkan karena adanya faktor penarik dan pendorong. Faktor pendorongnya adalah situasi politik di negeri Tiongkok yang tidak kondusif sehingga memaksa mereka untuk mencari tempat pemukiman yang lebih aman, sedangkan faktor penariknya adalah terjangkaunya wilayah Nanyang (Laut Selatan) dan tersedianya lapangan pekerjaan baru di wilayah Penang, Singapura, dan Bangka (Riau), terkait dengan peluang pekerjaan tenaga kasar di bidang pertambangan (Koentjaraningrat, 1978: 364).

Seiring dengan perkembangan kota Yogyakarta yang dimulai pada pertengahan abad XVIII ketika keraton dibangun, orang Tionghoa diberikan tempat tersendiri untuk tempat tinggal yakni di sebelah utara keraton tepatnya di ujung utara jalan Malioboro.

Semenjak tahun 1867 pemukiman orang Tionghoa di Yogyakarta mulai menyebar di daerah ibukota Yogyakarta. Daerah-daerah pemukiman tersebut meliputi Ketandan, Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, dan Suranatan.

Konsentrasi Pecinan di luar kota Yogyakarta terletak di kawasan Godean dan pada tahun 1916 sebagai kelanjutan dari peraturan *Rijksblad* nomor 4 tahun 1867. Adapun wilayah tersebut adalah Kranggan, Malioboro,

Ketandan, dan Ngabean. Peraturan ini direvisi dengan adanya *besluit* tanggal 31 Desember 1902 nomor 10062 P dan 10063 P, sekaligus memperluas daerah tempat tinggal komunitas Tionghoa di Yogyakarta (Prasetyo, 2015: 23).

Komunitas tersebut dikapal oleh seorang kapiten yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial sebagai koordinator wilayah sekaligus pengawas di daerah tertentu. Terdapat seorang keturunan Tionghoa bernama Tan Djin Sing yang sangat dihormati dan pernah menjabat sebagai bupati Yogyakarta serta namanya diabadikan sebagai nama Jalan Secodiningratan sesuai dengan akte notaris nomor 57 tanggal 24 April 1861 pada lampiran serat kekancingan. Nama jalan ini sejak 1956 hingga sekarang menjadi Jalan Pangeran Senopati di sebelah timur titik nol kawasan Malioboro, Yogyakarta (Wardoyo, 1990: pendahuluan).

Akar Historis Toko Kelontong

Secara historis, terminologi kelontong berasal dari pedagang keliling Tionghoa yang menggunakan alat berbunyi sejenis drum (gendang) kecil disebut “klontong”. Mereka berdagang “klontong” atau berdagang “langsam” (berasal dari bahasa Belanda yang berarti “pelan”) pada umumnya membawa berbagai jenis barang. Komoditas yang dijual merupakan barang-barang jadi dan barang kelontong kebutuhan rumah tangga seperti: kapas mentah, garam, nila, tembakau, jahe, sutera, porselin, tikar pandan, alat perkebunan, dan alat perang (senjata tajam) (Carey, 1984:9).

Mereka tidak hanya berkeliling di kota-kota saja, melainkan juga kerap menjangkau hingga ke desa-desa dan kampung-kampung terpencil untuk menawarkan aneka produk kepada penduduk desa. Secara etnisitas, pedagang klontong didominasi oleh marga Hokchia di desa-desa terpencil dan kota-kota besar yakni: Bandung, Solo, dan Yogyakarta.

Para pedagang kelontong tidak selalu memikul sendiri barang dagangannya karena terkadang mereka mempekerjakan kuli angkut pribumi untuk membawa komoditas perdagangan tersebut dengan pikulan

dan ada pula dengan cara menggunakan sepeda mengangkut penuh barang dagangan (Vleming, 1992: 171).

Selanjutnya, ada pedagang keliling yang membawa es atau “dapur kecil” yang bisa dibawa kemana-mana karena pada pertengahan abad XIX, es merupakan lambang “kenyamanan” yang sangat dibutuhkan ada di Hindia Belanda beriklim tropis.

Es menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena harus diimpor langsung dari Amerika Utara ke Hindia Belanda. Bahkan pada tahun 1869, keluarga keluarga kaya di Batavia hanya mampu meminum air es yang telah mencair demi memperoleh minuman dingin. Prosedur pembuatan amoniak, temuan Eropa, diimpor ke Jawa sekitar akhir tahun 1880 dan sepuluh tahun kemudian, pabrik es berlipat ganda di kota-kota besar dan kebiasaan minum minuman dingin me nyebar dengan luas.

Mrazek memaparkan dalam sebuah majalah “Magneet” Volume. I, Nomor 3 edisi 15 Januari 1914 memaparkan bagaimana es sangat dibutuhkan untuk mendinginkan bir untuk dikonsumsi masyarakat Eropa. Hal ini menjadikan es sebagai salah satu komoditas wajib yang dijual pedagang kelontong (Mrazek, 2006: 29),

Kemampuan berniaga yang didukung oleh kemampuan beradaptasi sosial secara horizontal dan vertikal telah menempatkan pedagang Tionghoa menjadi pedagang perantara. Liem Twan Djie membagi klasifikasi Perdagangan Perantara menjadi dua jenis: Perdagangan Perantara Koleksi dan Perdagangan Perantara Distribusi.

Perdagangan perantara koleksi adalah perdagangan yang secara langsung membeli hasil-hasil dari penduduk seperti: kopra, singkong, jagung, beras, kulit, gula jawa, dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan perdagangan perantara distribusi adalah suatu perdagangan yang memperjualbelikan aneka produk- produk: manufaktur, bahan makanan dan minuman, dan barang-barang kelontong (Djie, 1995: 9).

Selain dari memperdagangkan komoditas konsumsi, pedagang kelontong juga menjual barang-barang kerajinan tangan, barang-barang bermotif renda, sulaman sutera, kulit, dan barang-barang lain dari negeri

Tiongkok. Tidak jarang pula para pedagang klontong menjual opium sebagai salah satu barang dagangannya, terutama yang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan buruh pribumi (Rush, 200:126).

Transformasi Kelontong dan Sistem Kongsi

Berkat kegigihan dan ketekunan para pedagang kelontong Tionghoa berdampak pada pola pemasarannya yang berawal dari bersifat nomaden dan aktif menawarkan barang dagangan ke calon pembeli beralih ke sistem penjualan bersifat menetap berbentuk toko atau dengan cara membangun kombinasi rumah dan toko (ruko).

Lombard memaparkan bahwa pada dasarnya sistem ruko merupakan pola jalan pertokoan berbentuk lurus dengan dua deret toko yang saling berhadapan. Pola ini menyerupai sistem pertokoan di Fujian dan Guandong, Tiongkok pada abad XIX (Lombard, 2005: 275).

Sistem pemasaran dengan sistem ruko sangat banyak dijumpai di berbagai wilayah Jawa dan Sumatera. Proses jual beli eceran (*retail trade*) cenderung lebih didominasi oleh kelompok *totok* dari berbagai kelompok suku Tionghoa, terutama Hakka, yang banyak diantaranya adalah pemilik warung atau toko klontong.

Istilah “toko” berasal dari bahasa Hokkian, sedangkan di Sumatera dan Semenanjung Melayu biasa menyebut dengan istilah “kedai”, yang merupakan bahasa Tamil. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah ruangan tempat barang dagangan ditumpuk tanpa aturan jelas, atau hanya ditata dalam rak-rak di sepanjang dinding (Lombard, 2005: 300).

Secara umum, masyarakat Tionghoa bersifat heterogen dengan berbagai identitas kesukuannya masing-masing, yakni: Hokkian, Hakka (Khek), Thiu Chiu, Hokchia, Kanton, dan lain sebagainya. Masing-masing etnis memiliki dan mewarisi karakteristik kemampuan yang berujung pada jenis mata pencariannya (Koentjaraningrat, 1978: 364).

Mayoritas yang berprofesi sebagai pedagang klontong merupakan suku Hakka dikarenakan golongan inilah yang terlebih dahulu berhasil dalam merintis bisnis perdagangan klontong hingga berubah menjadi

suatu metode perdagangan kelontong dengan sistem menetap di suatu wilayah. Komoditas yang selalu adalah beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Di kota-kota besar seperti: Batavia, Semarang, Surabaya, Bandung, Solo, dan Yogyakarta, dilakukan suatu perdagangan penting yang menempatkan beras sebagai komoditas utama (Die, 1979: 56).

Memasuki era depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, barang kebutuhan sehari-hari merupakan barang-barang yang paling banyak dijual di warung-warung ini, bahkan di daerah pedesaan terpencil sekali pun akan sangat mudah ditemukan (Yang, 2004: 61). Pada periode malaise sulit ini, telah terjadi peningkatan angka pengangguran akibat dampak krisis ekonomi. Hal ini berdampak pada munculnya Komite Penolong Werkloos untuk membantu para pengangguran di Yogyakarta (Ingleson, 2013: 158).

Secara umum, para pengelola usaha kelontong rata-rata berasal dari suku Hakka. Faktor-faktor pendukung suku Tionghoa Hakka mendominasi usaha bisnis perdagangan klontong dikarenakan beberapa faktor, antara lain: *pertama*, kedatangan mereka ke wilayah Hindia Belanda yang terbilang lebih awal dibanding suku Hokchia, mengakibatkan suku Hakka lebih mampu mengidentifikasi dan beradaptasi bagaimana memenuhi permintaan pasar terhadap kebutuhan pokok dari masyarakat pribumi dan Barat. *Kedua*, secara geografis, suku Hakka di negeri Tiongkok berasal dari wilayah berbasis pertanian dan mayoritas penduduknya berasal dari kalangan petani. Terdapat pula sumber yang menyatakan etnis Hakka banyak berkecimpung di area pertambangan (Purwanto, 2005: 329).

Hal tersebut baik pada aspek pertanian maupun pertambangan tentunya memberikan dampak positif berupa kemampuan teknik bertani ala Tionghoa yang sebelumnya teknik tersebut belum dipahami oleh kalangan petani pribumi serta pemahaman lingkungan alam sekitarnya. Contohnya adalah teknik membajak sawah dengan media kerbau sebagai penarik bajak. Kelebihan tersebut membuat masyarakat Cina suku Hakka cepat diterima oleh masyarakat pribumi.



Toko Kelontong Yogyakarta, 1915

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/786985>

Hubungan sosial antara suku Hakka dengan suku Hokcia sebenarnya tidak terlalu dekat. Hal tersebut dikarenakan kedua suku tersebut pada dasarnya memiliki bahasa daerah masing-masing yang berbeda sehingga menimbulkan kendala dalam berkomunikasi.

Selain itu orang Tionghoa cenderung lebih mengutamakan hubungan kongsi antar sesama orang Tionghoa yang berasal dari latar belakang daerah yang sama. Namun terdapat laporan yang menyebutkan bahwa adanya hubungan kerja sama antara suku Hakka dan Hokcia di bidang ekonomi karena adanya persamaan nasib sebagai sesama perantau dari negeri Tiongkok yang melatar belakangi hubungan kerja sama tersebut.

Relasi tersebut biasanya antara majikan dan bawahan (patron-client), dimana suku Hakka yang telah berhasil menjadi seorang pengusaha kelontong akan memberi upah pegawainya yang berasal dari suku Hokcia. Posisi yang diberikan adalah sebagai pegawai toko yang bertugas untuk menjaga toko, membantu melayani pelanggan hingga pekerjaan kasar lainnya. Orang baru yang pada permulaanya diterima di toko barang kelontong, setelah belajar segala sesuatunya dan sesudah mendapat kepercayaan dari majikannya, maka ia akan diperbolehkan mengambil macam-macam barang jadi seharga 25 hingga 50 gulden dengan kredit dari majikannya. Ini berarti bahwa ia membeli barang-barang ini karena majikannya akan mendebiter jumlah tersebut dan si pedagang klontong selanjutnya akan berdagang untuk dirinya sendiri.

Selama waktu yang singkat atau panjang (tergantung pedagang klontong tersebut), berkat cara hidup yang hemat dan sederhana, akan dapat membayar kembali hutangnya pada majikannya dan kemudian dapat bekerja dengan modalnya sendiri.

Selain itu, terdapat pula upaya lain untuk merintis sebagai pedagang kelontong dengan cara mereka berprofesi sebagai pedagang mindring yang memberikan jasa peminjaman dana kepada masyarakat kecil pribumi di desa-desa atau di kota untuk sebelum menjadi pedagang klontong yang menetap. Dalam masa menjadi pengusaha mindring inilah para calon pengusaha klontong berusaha mengumpulkan dana sebagai modal awal.

Periode menjadi seorang mindring juga dimanfaatkan untuk mencari pengalaman yang kelak bermanfaat untuk mengembangkan usahanya, antara lain: *pertama*, mengenal kebutuhan masyarakat lokal dengan cara terjun ke masyarakat sehingga mampu memahami apa yang dibutuhkan masyarakat pribumi. *Kedua*, dengan melakukan penelusuran ke masyarakat akan terjadi interaksi sosial horizontal antara pengusaha mindring dengan masyarakat pribumi yang kelak dapat dijadikan sebagai relasi atau pelanggan dalam usaha klontong.

Pada konteks tertentu, terminologi mindring tidak hanya berlaku bagi orang Tionghoa yang berprofesi meminjamkan uang karena mindring dalam usaha klontong juga dapat diartikan sebagai bunga atas barang dagangan yang dibeli secara kredit oleh konsumen dikarenakan usaha perdagangan klontong biasanya juga dilakukan bersamaan dengan pemberian kredit kepada pembeli pribumi, yaitu menjual barang atas dasar kredit. Barang-barang yang dibeli konsumen atas dasar pembayaran cicilan dan berdampak pada peningkatan harga sebuah barang karena terdapat bunga atas pembelian secara kredit.

Resiko apabila sang pembeli meninggal, melarikan diri, atau tidak mampu melunasi hutang tersebut maka beban tersebut akan dilimpahkan kepada pihak keluarga terdekat dari pembeli dan dalam melunasinya sangat sulit akibat adanya bunga yang semakin bertambah setiap harinya.

Sebagai dampak transaksi secara kredit inilah terkadang pedagang-pedagang klontong juga mendapat sebutan buruk di kalangan penduduk desa dengan sebutan “Cina mindring” atau “tukang mindring”. Kondisi ini menjadikan pedagang Tionghoa mampu hidup layak dan kerap menjadi sasaran kejahatan oleh kalangan orang bersenjata yang mengincar harta kekayaan secara paksa di kawasan Yogyakarta dan Solo (Suhartono, 1991: 153).

Keberadaan toko klontong hingga saat ini masih terjaga eksistensinya di kawasan Gondomanan, Poncowinatan hingga di kawasan pariwisata nasional Malioboro. Masyarakat pribumi juga banyak yang membuka usaha toko klontong, baik yang di kota maupun di desa. Namun yang harus kita cermati dari perspektif realitas sejarah adalah cikal-bakal toko klontong yang ada saat ini pada dasarnya dipelopori oleh orang Tionghoa.

Kehadiran orang Tionghoa yang begitu penting dalam bidang perdagangan menjadikan mereka sebagai pedagang perantara atau jembatan antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Kedekatan orang Tionghoa dengan Belanda melahirkan sebuah ungkapan berbahasa Jawa, *ana Landa ana Tionghoa* (dimana terdapat orang Belanda, disana terdapat orang Tionghoa) (Pranoto, 1994: 178).

Penutup

Simpulan

Eksistensi toko kelontong di masa kini yang semakin menjamur pada dasarnya merupakan hasil dari proses sejarah panjang perubahan sosial ekonomi masyarakat sejak masa kolonial hingga masa kini.

Kegigihan dan kemampuan beradaptasi secara sosial dan geografis menjadi modal berharga masyarakat Tionghoa dalam membangun relasi dan melihat peluang sebagai penyedia (supplier) berbagai komoditas bahan pokok bagi masyarakat pribumi dan kolonial (Barat).

Kegiatan usaha kelontong berawal dari sistem panggul yang berisi berbagai kebutuhan pokok dan ditawarkan secara individu dari rumah ke rumah calon pelanggan. Terminologi kelontong merujuk pada

drum/gendang kecil yang dibunyikan ketika menjajakan barang dagangannya. Bunyi yang khas tersebut dijadikan identitas yang identik dengan pedagang kelontong. Terkadang mereka juga menggunakan jasa kuli pribumi atau menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi.

Kelontong mulai terjadi perubahan pada aspek sistem pemasaran dari yang bersifat nomaden ke model menetap pada sebuah bangunan kombinasi rumah dan toko. Kesuksesan ini juga dibarengi dengan adanya sistem kongsi dari pemilik toko kelontong baik kepada sesama etnis Tionghoa maupun pelanggannya. Kongsi yang diterapkan antar sesama etnis berupa sistem kerja sama patron-client antara majikan dan karyawan. Sistem kolaborasi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap golongan etnis Tionghoa lain yang dianggap belum mapan atau sukses secara finansial sekaligus memberikan pengalaman magang dalam menjalankan usaha.

Sedangkan sistem kongsi antara pedagang dan pelanggan berupa pemberian kredit cicilan pembelian barang mesi terdapat bunga dalam proses pemabayarannya.

Saran

Kajian sejarah tentang toko kelontong, terutama kelontong tradisional, masih perlu dilakukan penelitian lanjutan mengingat dewasa ini keberadaannya semakin terdesak dengan semakin menjamurnya minimarket bersistem waralaba. Tidak bisa dipungkiri toko kelontong merupakan realitas historis bagaimana ia menjadi cikal bakal upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mulai dari perkotaan hingga pedesaan atau sebaliknya

Daftar pustaka

Buku

Carey, Peter. 1985. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina. 1755-1825*. Jakarta: Pustaka Azet.

Claver, Alexander. "The Chinese Diaspora in the Netherlands of Indies Population and Occupation Statistics", dalam Lindblad, J. Thomas dan Bambang Purwanto (eds.). 2010. *Merajut Sejarah Ekonomi*

- Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday.*
Yogyakarta: Ombak.
- Djie, Liem Twan. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-orang Cina di Jawa: Suatu Studi Ekonomi.* Jakarta: Gramedia.
- Ingleson, John. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Masa Kolonial.* Depok: Komunitas Bambu.
- Koentjaraningrat, "Twentieth Century Rural Urban Changes", dalam Soebadio, Haryati dan Carine A. du Marchie Sarvaas. 1978. *Dynamics of Indonesian History.* Amsterdam.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan Asia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mrázek, Rudolf. 2006. *Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ong Eng Die, "Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan", dalam Mely G. Tan (ed.). 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia : Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa.* Jakarta: Leknas LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Opium Cina, Indonesia Kolonial. 1860-1910.* Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa.
- Poerwanto, Hari. 2005. *Orang Tionghoa Khek dari Singkawang.* Depok: Komunitas Bambu.
- Rush, James R. 2000. *Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-bandar*
- Suhartono, "Tionghoa Klonthong: Rural Peddlers in the Residency of Surakarta 1850-1920", dalam Schutte, G.J. (ed.). 1994. *State and Trade in the Indonesian Archipelago.* Leiden: KITLV Press.
- Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920.* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tamburaka, Rustam E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tio Tek Hong. *Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: Sebuah Kenangan 1882-1959*. Depok: Masup Jakarta, 2007.

Uysal, Nuriye Degirmenci. "Teaching English to Very Young Learners." *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 197, no. 2 (July 2015): 19–22.

Vleming jnr, J.L. "The Chinese Business Community Today in the various parts of Netherlands India" in Fernando, M.R. and David Bulbeck (eds). 1992. *Chinese Economic Activity in Netherlands India: Selected Translations from the Dutch*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Yang, Twang Peck. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.

Jurnal

Peter Carey. "Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825". *Indonesia*, 37, 1. (1984) <https://doi:10.2307/3350933>

Muhzinat, Zumrotul, dan Siti Achiria "Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Toko Kelontong di Pasar Klampis Kabupaten Bangkalan Madura" *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vo. 6. No. 2 (2019): 204 – 205. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2448>.

Uysal, Nuriye Degirmenci. "Teaching English to Very Young Learners." *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 197, no. 2 (July 2015): 19–22. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.042>.

Prasetyo, Yudi. "Sejarah Komunitas Tionghoa Yogyakarta di Yogyakarta 1900 – 1942" *Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan* Vol. 1, no. 1 (April 2015):

Foto digital <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/786985>